

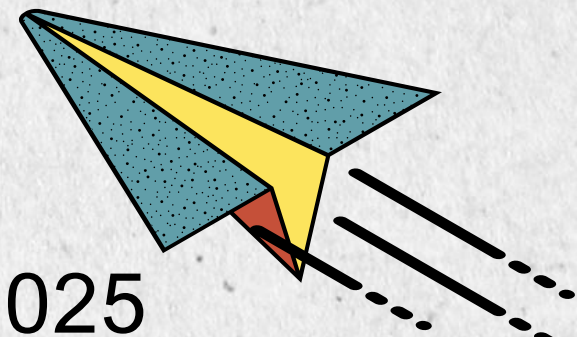


Rancangan Awal (RANWAL)

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN BELU
TAHUN 2026**

Disampaikan dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD

Atambua, 17 Februari 2025



OUTLINE



DASAR HUKUM



MAKSUD DAN TUJUAN



GAMBARAN UMUM



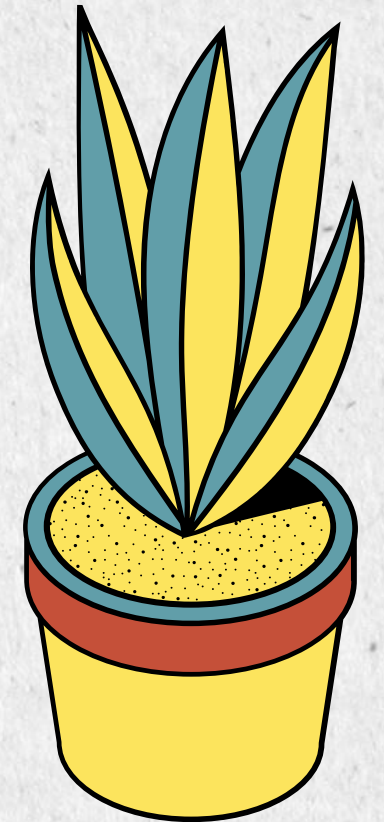
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



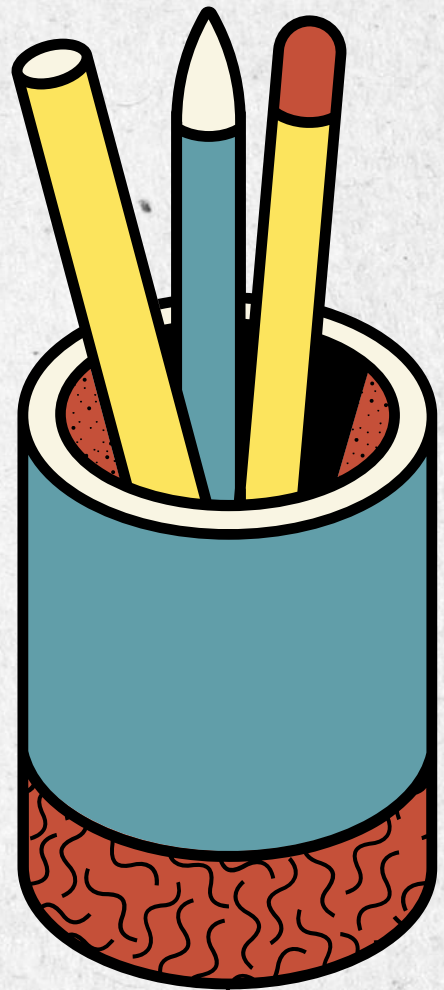
PRIORITAS PEMBANGUNAN



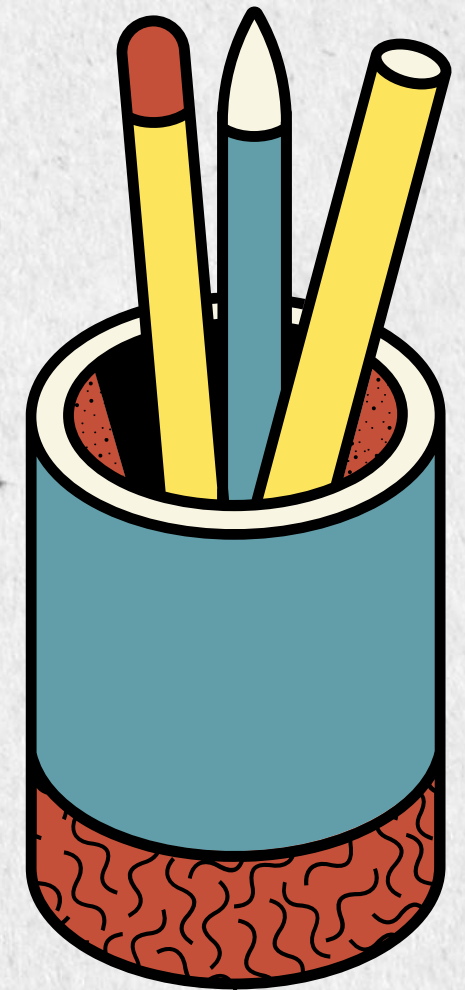
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN



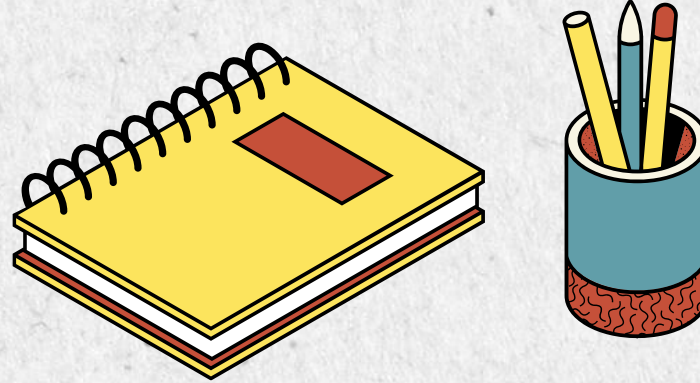
TEMA RKPD KABUPATEN BELU TAHUN 2026



**“PEMANTAPAN FONDASI
PELAYANAN DASAR DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
MENUJU KEMANDIRIAN LOKAL”**



DASAR HUKUM



-
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026



Tujuan

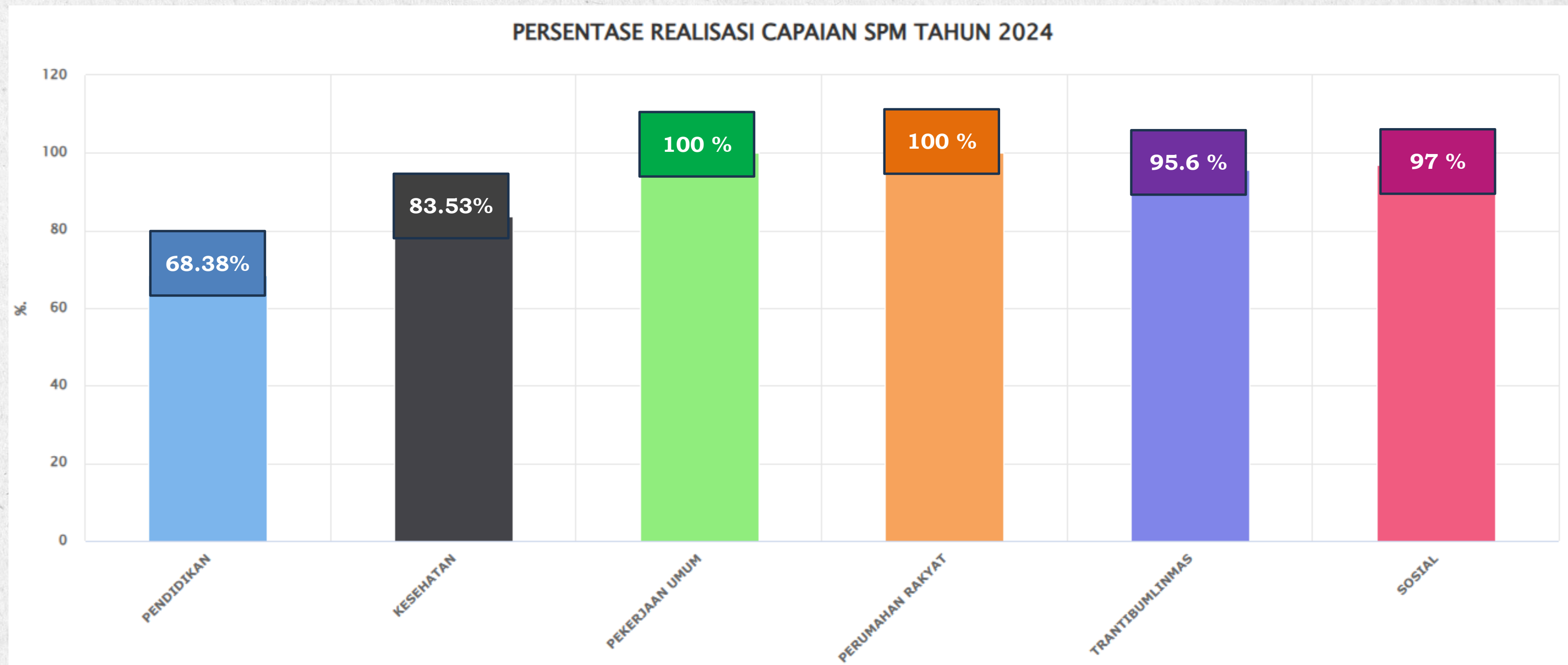
1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belu;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026; dan
7. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



I. EVALUASI SPM



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



I. EVALUASI SPM



Sumber:
spm.bangda.kemendagri.go.id



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



II. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024



**Indeks
Pembangunan
Manusia**

67.5
68.13



**Persentase
Stunting**

20
15.8



**Persentase
Penduduk Miskin**

15.07
13.8



**Pertumbuhan
Ekonomi**

3.65
4.16



**Tingkat
Pengangguran
Terbuka**

4
5.41



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



II. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024



Sumber: data sementara olahan BP4D, 2025



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



II. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

88.82

93.58



Persentase PAD terhadap Total Pendapatan

10.04

9.01




Persentase Desa Berkembang

69.56

78.28

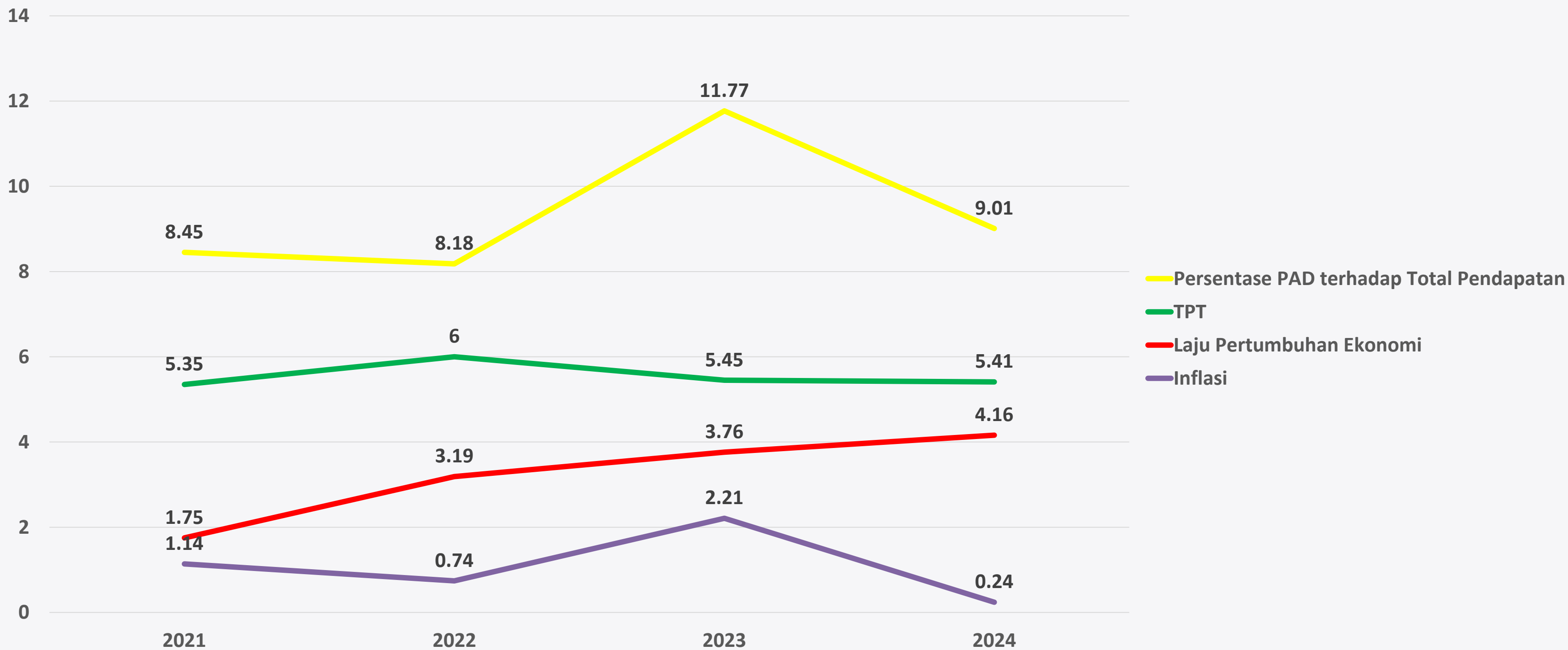
PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi SPM dan IKU Tahun 2024 dapat dirumuskan permasalahan pembangunan dari aspek kesejahteraan sosial, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek pelayanan publik sebagai berikut:

- 
- Ketimpangan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
 - Disparitas Pembangunan Wilayah dan Kesenjangan Infrastruktur Dasar sebagai Tantangan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
 - Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal dan Rendahnya Daya Saing Daerah dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi
 - Reformasi Birokrasi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2021-2024



Sumber: data sementara olahan BP4D, 2025

KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	985,787,286,141	1,017,470,454,240	1,020,405,539,669*
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85,996,877,961	132,611,330,557	120,405,539,669
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	888,736,542,667	873,796,047,683	900,000,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,053,865,513	11,063,076,000	-

Sumber: data sementara olahan BP4D, 2025; * BERDASARKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH MERUJUK KE HASIL TEMUAN BPKP

KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2024	2025	2026
5	BELANJA	991,187,973,003	1,044,074,724,655	1,020,405,539,669*
5.1	BELANJA OPERASIONAL	728,237,039,607	807,787,858,816	-
5.2	BELANJA MODAL	142,189,489,213	112,360,826,836	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18,499,819	3,234,868,078	14,742,029,078
5.4	BELANJA TRANSFER	120,742,944,364	120,691,170,925	-

Sumber: data sementara olahan BP4D, 2025; * BELUM MENYESUAIKAN DENGAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025

KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2024	2025	2026
	SURPLUS (DEFISIT)	5,400,686,863	26,604270,415	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75,598,090,032	27,049,984,	445,714,285
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	142,189,489,213	445,714,285	445,714,285
	PEMBIAYAAN NETTO	75,598,090,032	26,604270,415	

Sumber: data sementara olahan BP4D, 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia



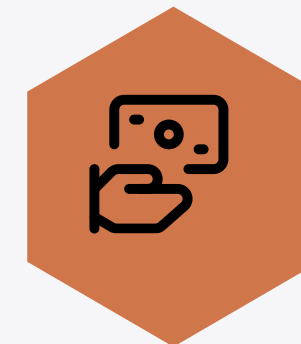
5) Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri



2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru



6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan



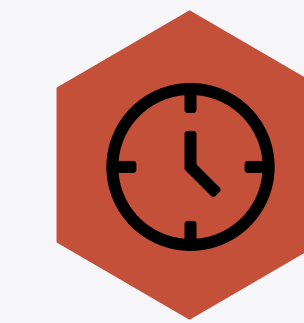
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi



7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan



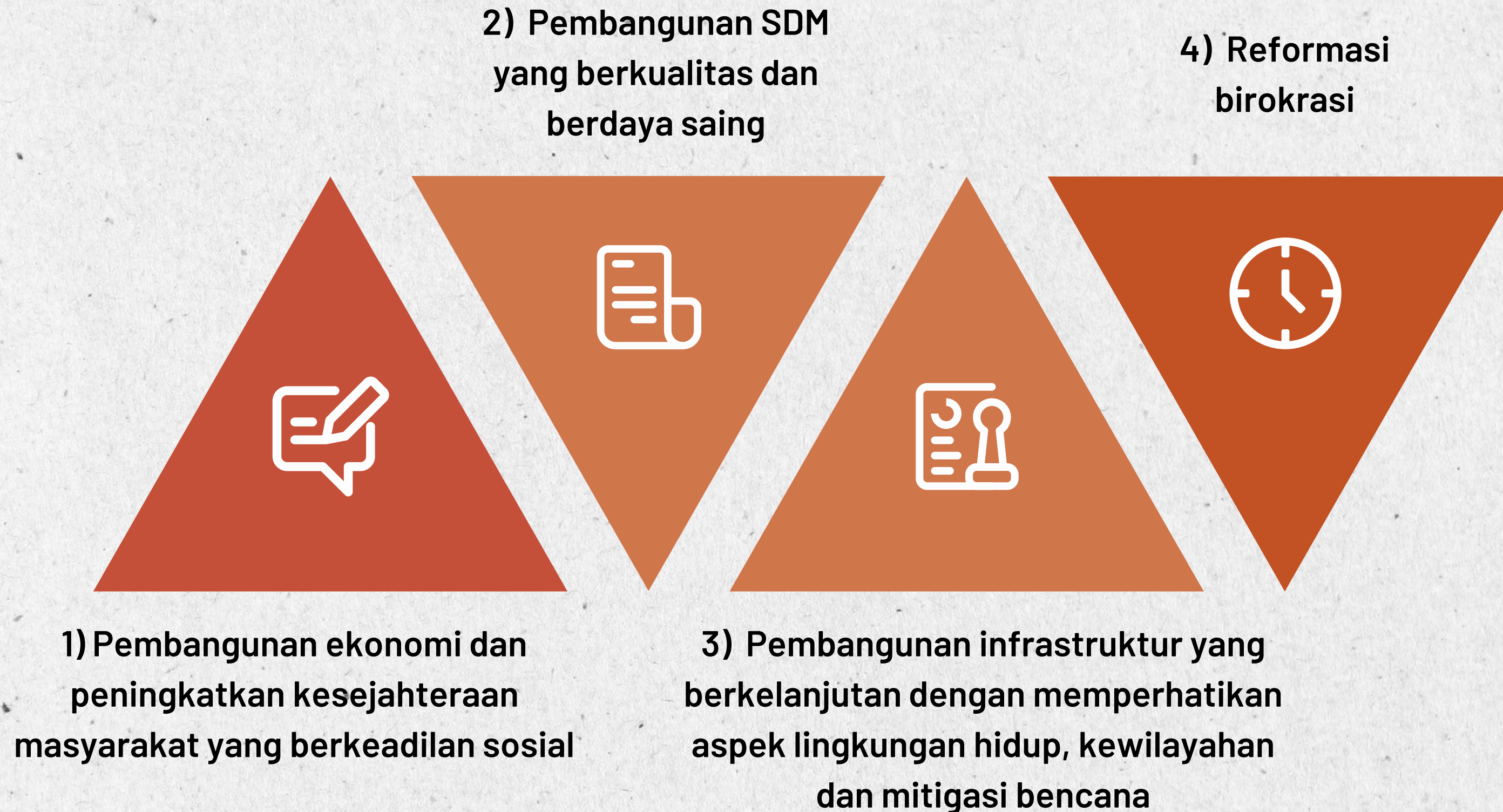
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas



8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT



PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELU

1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat

3) Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan

5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

4) Mewujudkan good governance

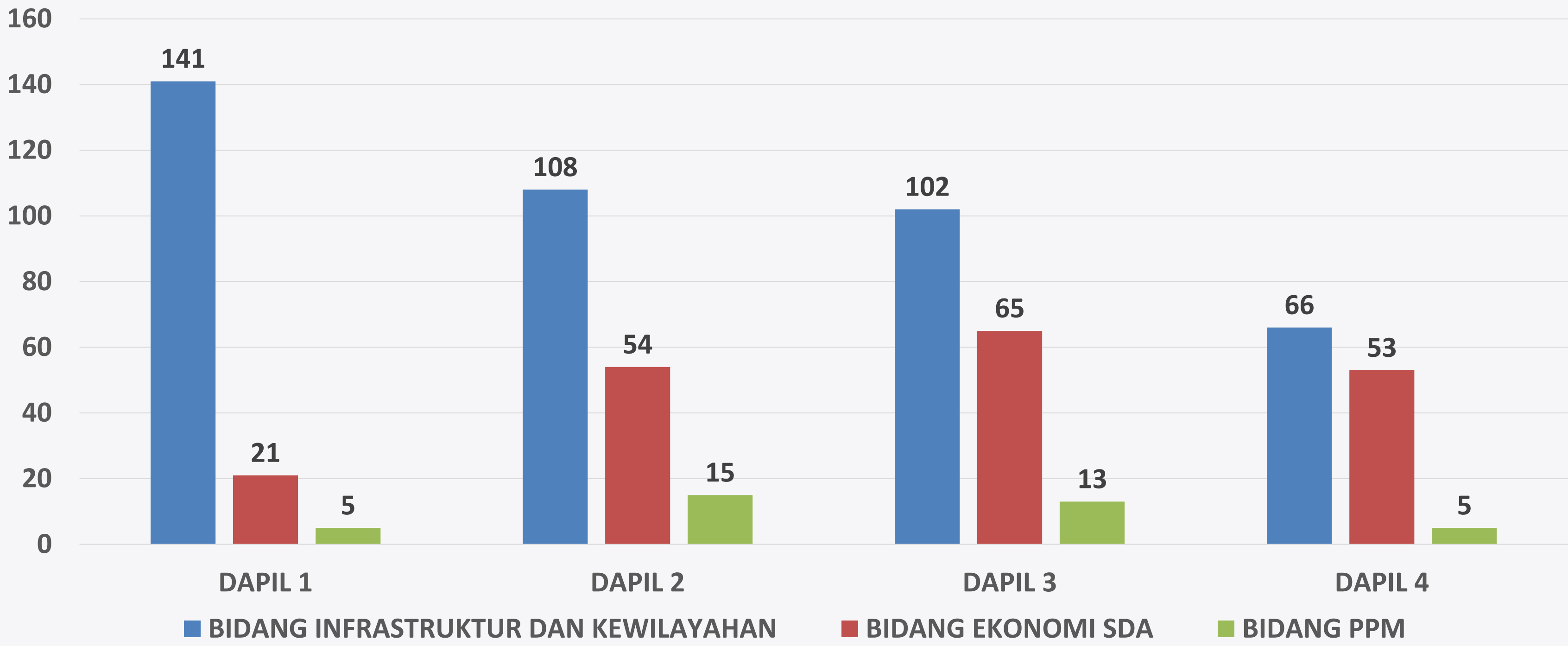
PERSANDINGAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional (Ranwal RPJMN Tahun 2025-2029)		Prioritas Kabupaten Belu (RPJMD Tahun 2021-2026)		Prioritas Provinsi NTT (RPD Tahun 2024-2026)
(1) Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		(1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;		(1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
(2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;		(2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;		(2) Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
(3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;		(3) Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan; serta		(3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; serta
(4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;		(4) Mewujudkan <i>good governance</i> ;		(4) Reformasi birokrasi.
(5) Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;		(5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.		
(6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;				
(7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta				
(8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.				

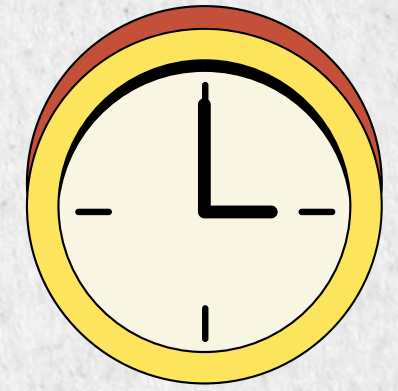
INTEGRASI POKIR DALAM RKPD TAHUN 2026

HASIL RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN BELU TAHUN 2024
BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN BIDANG PEMBANGUNAN



PRIORITAS PENDANAAN RKPD KABUPATEN BELU

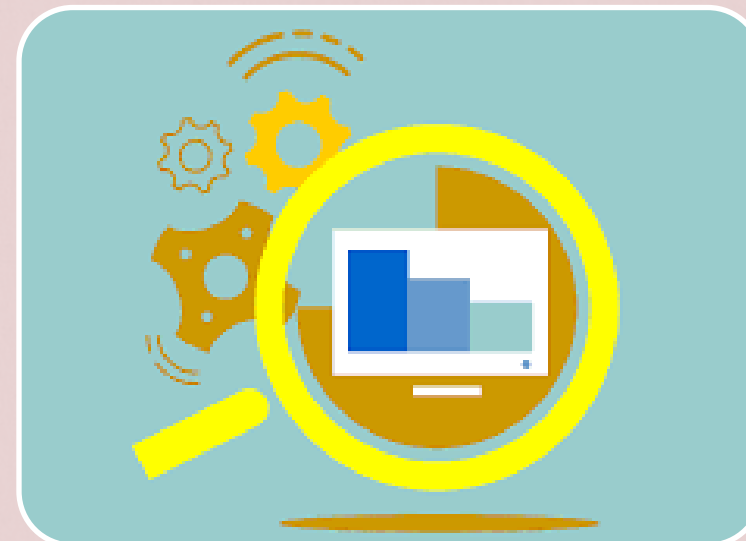
TAHUN 2026



- SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN
- TEMATIK STUNTING
- TEMATIK KEMISKINAN
- TEMATIK PARIWISATA
- KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN



180

PROGRAM

475

KEGIATAN

1332

**SUB
KEGIATAN**

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	620,087,650,454
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	293,688,578,873
2	Dinas Kesehatan	114,252,200,850
3	RSUD Atambua	86,654,795,729
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	105,316,224,102
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,359,469,855
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6,220,520,118
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,595,860,927

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	35,253,573,634
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB	7,981,083,386
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9,480,558,873
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,981,920,330
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,662,812,261
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,648,977,156
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,632,605,553

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Urusan Pilihan	42,463,948,818
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4,124,850,714
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	11,884,636,149
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20,846,847,346
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5,607,614,609
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	47,136,147,052
19	Bagian Pemerintahan	338,137,300
20	Bagian Hukum	389,879,000

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Urusan Pilihan	42,463,948,818
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4,124,850,714
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	11,884,636,149
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20,846,847,346
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5,607,614,609
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	47,136,147,052
19	Bagian Pemerintahan	338,137,300
20	Bagian Hukum	389,879,000

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
21	Bagian Perekonomian dan SDA	168,671,500
22	Bagian Administrasi Pembangunan	205,475,700
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2,440,760,000
24	Bagian Organisasi	419,182,900
25	Bagian Umum	18,625,953,766
26	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	429,802,325
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	695,854,450
28	Sekretariat DPRD	23,422,430,111

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	229,097,467,512
29	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,976,662,853
30	Badan Pendapatan Daerah	5,582,337,742
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	139,739,653,959
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	75,600,997,275
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,197,815,683
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	5,530,654,560
34	Inspektorat	5,530,654,560

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

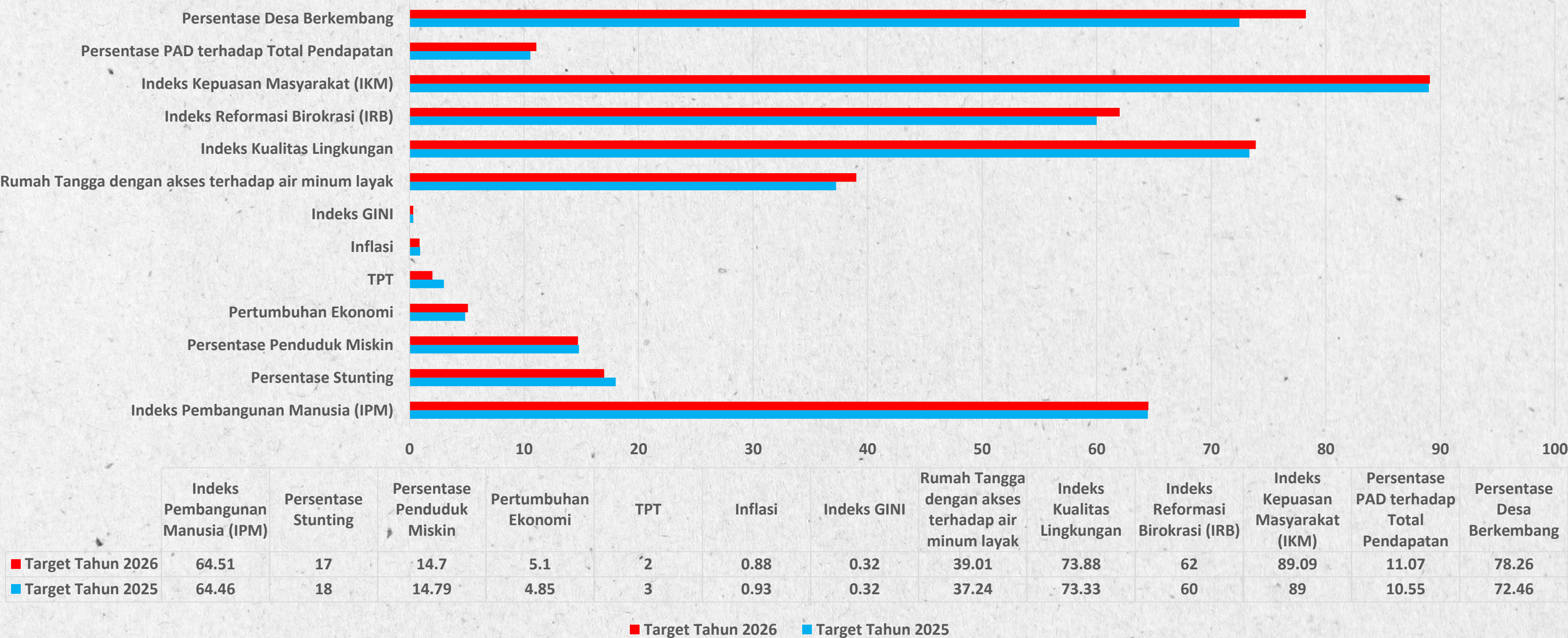
No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
	Unsur Kewilayahan	35,857,760,820
35	Kecamatan Kota Atambua	7,196,166,467
36	Kecamatan Tasifeto Barat	1,839,585,534
37	Kecamatan Tasifeto Timur	2,030,548,714
38	Kecamatan Raihat	1,441,056,290
39	Kecamatan Lamaknen	1,464,376,075
40	Kecamatan Kakuluk Mesak	2,392,633,660
41	Kecamatan Raimanuk	1,983,783,718

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2026
42	Kecamatan Lasiolat	1,663,454,522
43	Kecamatan Atambua Selatan	7,130,954,362
44	Kecamatan Atambua Barat	5,613,810,830
45	Kecamatan Lamaknen Selatan	1,776,857,481
46	Kecamatan Nanaet Duabesi	1,324,533,167
	Unsur Pemerintahan Umum	4,978,336,819
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,978,336,819
TOTAL		1,020,405,539,669

TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 DAN 2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 DAN 2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026



TERIMA KASIH

